

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anton Tabah, 2007. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, hal.135-136.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (edisi revisi). Bandung. Rosdakarya.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awaloeddin Djamin, "Suatu Pemikiran Kearah Pembinaan Aparatur Penegak Hukum yang Bersih dan Berwibawa" *Makalah Seminar Jakarta*, (1997), hlm. 101
- B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, (1982), hlm. 25.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Chandler, Ralph C. dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*.
- Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock (1995). *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dunn, W. 1999. *Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Dwilaksana cryshnanda, 2009, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Jakarta; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, hal.62
- Elmore. R. 1980. *Organizational Madels of Social Program Implementation. Public Policy*.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam perspektif kebijakan *deliberatif policy*. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.

Hjern, B. And C. Hull. 1982. *Implementation Research as Empirical Constitutionalism. European Journal Political Research.*

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/08/mantapkan-prinsip-restorative-justice-bhabinkamtibmas-jajaran-polda-kalsel-dibekali-buku-saku>.

<https://banjarmasinkota.bps.go.id/publication/2021/10/06/eaae360e77b5c1be35691a6b/statistik-daerah-kota-banjarmasin-2021.html>

Islamy, M. Irfan, (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika.

Kartasasmita, G. (1994). *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

Keban, Yeremias T, (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media

Kustriani, S. H. W. (2015). Modul Pelatihan Analisis kebijakan. *In Knowledge Sector Initiative* (pp. 1–350)

Lipsky, Michael. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russel Sage.

Martini, F. 2001. *Fundamental of Anatomy and Physiologi*, 5th ed, Prentice Hall, New Jersey.

Maarse F. 1994. *Implementation of Public Policies*. Swets North America : Berwyn.

Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nigro, Felix A & Loyd G. Nigro. (1980). *Modern Public Administration*. New York: Harper & Row, Publishers.

Nugroho, R.D. 2009. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, Gramedia. Jakarta.

Parsons, W. 2006. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana. Jakarta.*

Pasolong, Harbani, (2007). *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Paul Peter, 1990, *Strategic Management*, New York :McGraw Hill,

- Poerwandari, E.K. (2007). Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Jakarta
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hal. 2-4.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Putra, F. 2003. *Partai Politik & Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar. Malang.
- Sabatier, PA. 1986. "Top-down and Bottom-Up Approach to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis", *Journal of Public Policy*.
- Safritz . JM, and Russel E.W. 1997. *Introducing Public Administrations*. Addison-Wesley Educational Publishers Inc. New York.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Government*. Refika Aditama. Bandung.
- Satjipto Rahardji. (2002). *Polisi Sipil: dalam Perubahan social di Indonesia*, editor: Hasyim Asy'ari, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 59-60
- Sudhirajati, Tanya, Polmas Sebagai Paradigma Baru Polri, Jakarta, 2007, Forum Media Utama.
- Sunggono, B. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta – Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. ALFABETA.
- Supranto, J. (2000). *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Sutanto, Jenderal Pol (2008), *Polmas falsafah baru pemolisian*. Jakarta : Pensil 324 bekerja sama Derembang Kapolri.
- Tangkilisan, H. N. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transpormasi pikiran George Edwards*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Trojanowicz, Robert dan Bonnie Bocqueroux, 1998, *Community Policing, How to get Started*, Second Edtion, Cincinnati, OH : Anderson Publishing Co.
- Wahab, S. A. 2001, *Analisis Kebijakan Publik; Teori dan Aplikasinya*, FIA Universitas Brawijaya Malang.
- Widodo, J. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia. Jawa Timur.

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.

PERATURAN NEGARA/ UNDANG-UNDANG

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 7, *Pedoman Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri*, Jakarta, m hal.18.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Rencana Strategis Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Tahun 2020 – 2024.

Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 433 / VII/ 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan dan pembentukan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas).

Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021

Surat Keputusan Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Banjarmasin Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Wilayah Kota Banjarmasin.